



Kebijakan Merdeka belajar Kampus merdeka (MBKM) di Indonesia

Nurotun Mumtahanah

Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban

Email: ningmumun76@gmail.com

Siti Suwaibatul Aslamiyah

Universitas Islam Lamongan

Email: suwaibah0105@gmail.com

Victor Imaduddin Ahmad

Universitas Islam Lamongan

Email: victorimaduddin109@gmail.com

Abstract: kebijakan merdeka belajar kampus merdeka pertama kali diterapkan di Indonesia mengalami pasang surut penerimaan terutama di perguruan tinggi, akan tetapi seiring berjalannya mbkm, mbkm terdapat suatu inovasi belajar sehingga mampu menghasilkan mahasiswa yang kreatif, inovatif, dengan pengembangan potensi diri yang maksimal sesuai dengan skil dan bakat yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan mbkm di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan library reseach dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pertama kebijakan sendiri sudah tepat sasaran yang diperuntukkan untuk perguruan tinggi, Kedua tepat pelaksanaannya. Ketiga tepat target. Keempat Tepat lingkungan. Kelima tempat proses pelaksanaan mbkm.

Keywords: Kebijakan, MBKM, Perguruan Tinggi

Pendahuluan

Hadirnya kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 ini dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memunculkan paradigma baru dalam dunia pendidikan termasuk pendidikan tinggi.

Dasar pemikiran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mengandung arti kemandirian dan kemerdekaan bagi lembaga pendidikan baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Menurut Nadiem Makarim, konsep dasar memilih

merdeka belajar adalah karena terinspirasi dari filsafat K.H. Dewantara dengan penekanan pada kemerdekaan dan kemandiriannya.¹

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dianggap relevan dan tepat dilaksanakan di era demokrasi saat ini. Definisi merdeka disini dapat diterapkan dalam proses pendidikan seperti pada proses perkuliahan diperguruan tinggi, mahasiswa pada memilih delapan program merdeka belajar yang ditawarkan oleh kementerian, dimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama selama satu semester atau setara dengan 20 sks.²

Untuk program perkuliahan terbatas pada mata kuliah yang telah ditetapkan oleh universitas masing-masing. Selanjutnya, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk kuliah dua semester untuk mengikuti perkuliahan di luar perguruan tinggi, baik dengan memilih prodi yang sama atau prodi yang berbeda. Agar dapat menjalankan program pertukaran pelajar ini, kedua universitas dan program studi harus melakukan kerjasama sebagai bentuk komitmen dan dasar pijakan dalam menjalankan program. Selain program pertukaran pelajar, terdapat juga tujuh program lainnya seperti, magang, membangun desa, proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, asisten mengajar di satuan pendidikan dan penelitian.³

Pemaparan diatas terlihat bahwa pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terdapat suatu inovasi belajar sehingga mampu menghasilkan mahasiswa yang kreatif, inovatif, dengan pengembangan potensi diri yang maksimal sesuai dengan skil dan bakat yang dimiliki. Namun dalam penerapan program pastinya masih banyak kendala, termasuk kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi swasta.

Berbagai kebijakan dan kajian dilakukan oleh pemerintah dan perguruan tinggi guna memperoleh relevansi pengajaran, pelatihan, dan pendidikan di perguruan tinggi dalam merespon kemajuan tersebut. Kajian tentang kebijakan tersebut tentu harus memperhatikan ilmu pengetahuan dan tuntutan dunia kerja, serta kehidupan kampus dan hubungannya dengan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang nantinya sebagai upaya membangun generasi yang berpotensi.⁴

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi salah satu kajian kebijakan yang tengah digalakan pemerintah untuk diterapkan pada dunia pendidikan perguruan tinggi. MBKM adalah mode pembelajaran pendidikan tinggi yang mandiri dan

¹ Muhammad Rusli Baharuddin, "Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi)," *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 4, no. 1 (2021): 195–205, <https://www.e-journal.my.id/jsgp/article/view/591>.

² Seminar Nasional and Fakultas Pertanian, "Sinergi DUDI Dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)," *Seminar Nasional Fakultas Pertanian Uns*, no. April (2021).

³ Konstantinus Denny Pareira Denny, Richardo Barry Astro, and Maimunah H Daud, "Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia," *Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 675–685.

⁴ Ibid.

serbaguna yang dirancang untuk menciptakan komunitas pembelajaran kreatif yang tidak membatasi yang memenuhi kebutuhan mahasiswa.⁵

Program MBKM merupakan revolusi pendidikan yang berdasarkan pada perkembangan industri 4.0. Kebijakan MBKM diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, khususnya Pasal 15 sampai dengan 18. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan. di program studi dan/atau di luar kampus.⁶

Kebijakan MBKM bertujuan untuk mewujudkan manusia yang berdaya saing; Artinya, manusia sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat, produktif, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Instrumen penting implementasinya adalah dengan menerapkan delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754/P/2020. Universitas Flores, melalui SK Rektor no. 2 Tahun 2021 turut berpartisipasi dalam program kebijakan MBKM.⁷

Beberapa artikel telah mengkaji dan membahas terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) antara lain; Nora Susilawati (2021) menjelaskan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam pandangan filsafat pendidikan humanisme. Berikutnya Siti Mustaghfiroh (2020) yang membahas tentang konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memiliki arah dan tujuan yang sama dengan konsep aliran filsafat pendidikan progresivisme John Dewey. Nurhayani, 2020. menguraikan tentang konsep kampus merdeka belajar di era revolusi 4.0; selanjutnya Muslikh (2020) menulis tentang landasan filosofis dan analisis terhadap kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka.

Mewujudkan capaian pembelajaran yang optimal. Sejauh ini belum banyak ditemukan penelitian yang mendeskripsikan Kebijakan Merdeka belajar Kampus merdeka (MBKM) di Indonesia, oleh karena itu, saya selaku mahasiswa program doktoral manajemen pendidikan islam yang mendapat bagian memaparkan makalah dengan judul “Kebijakan Merdeka belajar Kampus merdeka (MBKM) di Indonesia”.

Hasil & Pembahasan

Konsep Kebijakan Publik

Thomas Dye mendefinisikan kebijakan sebagai “*Whatever governments choose to do or not to do.*” Kebijakan “MBKM” merupakan keputusan pemerintah untuk memperbaiki system dan cara pembelajaran di Indonesia, khususnya perguruan tinggi, agar siap dan mampu bersaing secara global terutama dalam dunia kerja.⁸ Hal ini sejalan dengan pemikiran Lasswell dan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan , nilai dan praktik “a

⁵ Ibid.

⁶ Endang Sulistiyani et al., “Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Fakultas Kesehatan Dan Non Kesehatan,” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 686–698.

⁷ Denny, Astro, and Daud, “Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia.”

⁸ Sulistiyani et al., “Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Fakultas Kesehatan Dan Non Kesehatan.”

projected of goals, values and practices.” Kevin dan Christoher mendefinisikan “*Implementation is what happen after government declares a formal intent to do something and before a policy outcome has been produced*”. Sementara Riant Nugroho mendefinisikan kebijakan publik sebagai “setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan”.⁹

Implementasi Kebijakan

Wildavsky mengemukakan “ Implementasi adalah proses yang melibatkan pihak yang melaksanakan implementasi dalam pembuatan kebijakan dan dalam menjalankannya atau melaksanakannya dari atas.” Kebijakan kampus merdeka, merdeka belajar merupakan proses yang melibatkan seluruh kampus di Jawa Timur, sebagai pelaksana kebijakan dari menteri pendidikan yang dilakukan secara *topdown*. Riant Nugroho menyatakan” Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁰

Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implentasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Graham mengatakan “memahami implementasi sebagai wacana antara kebijakan dan pelaksanaannya. Implementasi kebijakan dipercaya sebagai tindakan selanjutnya dari keputusan kebijakan, setidaknya tidak ada kesenjangan antara keputusan dan implementasi kebijakan”.¹¹

Pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi untuk keefektivan implementasi kebijakan. Pertama apakah kebijakan sendiri sudah tepat? Kedua tepat pelaksanaannya. Ketiga tepat target. Keempat Tepat lingkungan. Kelima tempat proses. Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga proses: *policy acceptance*, *policy adaption*, dan *strategic readiness*.¹² Berkenaan dengan kesiapan strategis, maka ada 3 kesiapan strategis yang perlu dicermati untuk keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: Organisasional, manusia dan lingkungan. Kesiapan organisasional berkenaan dengan isu: pertama apakah organisasi sudah mendapat mandat yang mencukupi untuk melaksanakan kebijakan. Kedua apakah organisasi memiliki sumber daya untuk implementasi yang mencukupi, baik dari struktur,system, manusia dan financial. Ketiga apakah organisasi sudah memiliki rencana implementasi dan

⁹ Tuti Marjan Fuadi and Dian Aswita, “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm): Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh,” *Jurnal Dedikasi Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 603–614, <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi>.

¹⁰ Falentina Lucia Banda et al., “EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Persepsi Tenaga Kependidikan Tentang Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Studi Kasus Di Universitas Flores Ende” 4, no. 1 (2022): 952–962.

¹¹ Konstantinus Denny Preira Make et al., “Persepsi Mahasiswa Terhadap Desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka : Survei Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores,” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 934–943.

¹² Yudi Wahyudin et al., “EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Evaluasi Dampak Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Bidang Studi Akuakultur” 4, no. 1 (2022): 1551–1564.

infrastruktur implementasi di dalam organisasi yang mencukupi, yang mencakup roadmap, work-plan, termasuk “*who doing what, when, where, dan how.*”¹³

Model Implementasi Kebijakan

Model-model implementasi menurut Riant Nugroho pemilahan jenis teknik atau model implementasi kebijakan.¹⁴

- a. Dari atas ke bawah (top-bottom) ◇ partisipasi lebih berbentuk mobilisasi.
- b. Dari bawah ke atas (bottom-top) ◇ kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat.
- c. Implementasi yang berpola paksa (command-control) ◇ model yang mengedepankan monopoli mekanisme paksa dalam Negara, ada sanksi dan tidak ada insentif.
- d. Mekanisme pasar (*economic-incentive*).

Model implementasi kebijakan Donald Van Meter, Carl Van Horn : implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Variable yang mempengaruhi kebijakan publik diantaranya adalah¹⁵:

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- 2) Karakteristik implementator.
- 3) Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
- 4) Kecenderungan dari implementator.

Model implementasi Daniel Mazmanian, Paul A Sabatier. Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan publik dalam tiga variable¹⁶:

- a) Variable independen.
- b) Variable intervening.
- c) Variable dependen.

Model Brian W. Hoogwood, Levis A. Gun. Untuk melakukan kebijakan diperlukan beberapa syarat:¹⁷

1. Jaminan kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga tidak akan menimbulkan masalah yang besar
2. Ketersediaan sumberdaya yang memadai.

¹³ Ratna Puspitasari and Riant Nugroho, “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka FISIP UPN Veteran Jawa Timur,” *Jurnal Dinamika Governance* 11, no. 2 (2021): 276–292, <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2539>.

¹⁴ Kriswanda Krishnapatria, “MBKM Curriculum in English Studies Program: Challenges and Opportunities,” *ELT in Focus* 4, no. 1 (2021): 15–38.

¹⁵ Tuti Marjan Fuad, “Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM: Aplikasinya Dalam Pendidikan Biologi,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 3 (2021): 2013–2015.

¹⁶ Sulistiyani et al., “Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Fakultas Kesehatan Dan Non Kesehatan.”

¹⁷ Shelly Andari et al., “Student Exchange Program of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) in Covid-19 Pandemic,” *JPP (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran)* 28, no. 1 (2021): 30–37.

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan pada urutan yang benar.

Model Richard Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern, David O'Porter. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau melibatkan pejabat pemerintah di tataran bawah.

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ada dua konsep yang esensial dalam “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka”.¹⁸ *Pertama*, konsep merdeka belajar mengandung arti adanya kemerdekaan berpikir. Menurut Nadiem Makarim bahwa esensi kemerdekaan berpikir harus dimulai terlebih dulu oleh para pendidik.¹⁹ Pandangan seperti ini harus dilihat sebagai suatu upaya untuk menghormati perubahan dalam pembelajaran di lembaga Pendidikan baik di sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi.

Kedua, kampus merdeka merupakan kelanjutan dari konsep merdeka belajar. Kampus merdeka merupakan upaya untuk melepaskan belenggu untuk bisa bergerak lebih mudah. Arti kampus merdeka adalah²⁰:

1. Adanya otonomi perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk melakukan pembukaan atau mendirikan program studi baru. Otonomi akan diberikan bagi perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B. Selanjutnya, perguruan tinggi tersebut telah melakukan Kerjasama dengan organisasi atau universitas yang termasuk dalam QS Top 100 World Universities. Kerjasama berbentuk penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang serta penempatan kerja bagi mahasiswa.
2. Program re-akreditasi otomatis. Program ini bersifat otomatis bagi semua peringkat dan bersifat sukarela bila perguruan tinggi atau prodi telah siap untuk naik peringkat. Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama lima tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan Kembali dilakukan paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi terakhir. Bagi

¹⁸ Berita Mambarasi Nehe, “Kampus Merdeka Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Masa Pandemi Di STKIP Setia Budhi,” *Prosiding Seminar Nasional Setiabudhi* 1, no. 1 (2021): 13–19, <https://jurnal.stkipsetiabudhi.ac.id/index.php/prosiding/article/view/18>.

¹⁹ Nora Susilawati, “Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme,” *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2021): 203–219.

²⁰ Denny Kodrat, “Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Policy,” *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4, no. 1 (2021): 9–14.

perguruan tinggi atau prodi yang telah memperoleh akreditasi A, maka diberikan kesempatan untuk memperoleh akreditasi Internasional.

3. Kebebasan bagi perguruan tinggi negeri BLU (Badan Layanan Umum) dan Satker (Satuan Kerja) untuk menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).
4. Hak belajar selama tiga semester di luar program studi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak untuk mahasiswa secara sukarela mengambil atau tidak di luar perguruan tingginya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampus sebanyak satu semester.²¹

Hak belajar tiga semester di luar program studi adalah menyiapkan kompetensi mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia industri dan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kompetensi mahasiswa harus disesuaikan dengan tuntutan zaman yang mengalami perubahan tersebut sehingga adanya link and match dengan dunia industri dan dunia kerja serta masa depan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa²²:

- a. Bentuk pembelajaran dilakukan dalam program studi dan di luar program studi.
- b. Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri dari:
 - 1) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama
 - 2) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda
 - 3) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda
 - 4) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
- c. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- d. Proses pembelajaran di luar program studi ditentukan oleh Kementrian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- e. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- f. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.²³

²¹ Tuti Marjan Fuad, "Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM: Aplikasinya Dalam Pendidikan Biologi."

²² Autoridad Nacional del Servicio Civil, "MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM): INVENTARISASI MITRA DALAM PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Dian," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 1 (2021): 2013–2015.

²³ Denny, Astro, and Daud, "Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia."

Hak belajar diberikan kepada mahasiswa tiga semester di luar program studi yaitu berupa satu semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan dua semester melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Bentuk kegiatan di luar perguruan tinggi dapat berupa magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan Pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi atau proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.²⁴

Tujuan MBKM adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Bentuk kegiatan pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 dinyatakan dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi yang meliputi²⁵:

Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar dilakukan antar perguruan tinggi dengan sistem transfer kredit. Pertukaran pelajar dapat membentuk sikap mahasiswa seperti menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, pendapat atau temuan orisinal orang lain, bekerjasama, memiliki kepekaan sosial atau kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan²⁶. Adapun tujuan pertukaran pelajar ini adalah:

- a. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), sehingga terbangun persaudaraan lintas budaya dan suku.
- b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga terbangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Melaksanakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas Pendidikan, baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi tinggi dalam negeri dengan luar negeri.²⁷

Dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Bentuk pembelajaran yang diambil untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran yang telah tertuang dalam struktur kurikulum atau pengembangan kurikulum dalam memperkaya capaian pembelajaran lulusan dalam bentuk mata kuliah pilihan.

Magang / Praktik Kerja

²⁴ Sulistiyani et al., "Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Fakultas Kesehatan Dan Non Kesehatan."

²⁵ Fuadi and Aswita, "Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MbkM): Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh."

²⁶ Banda et al., "EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Persepsi Tenaga Kependidikan Tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Studi Kasus Di Universitas Flores Ende."

²⁷ Make et al., "Persepsi Mahasiswa Terhadap Desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka : Survei Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores."

Magang dilakukan 1-2 semester dengan melakukan pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Kegiatan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi dalam bentuk hard skills dan soft skills. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kerjasama dengan mitra seperti perusahaan, Yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, dan perusahaan rintisan. Mahasiswa memperoleh hard skills seperti keterampilan, complex problem solving, dan analytical skills. Sedangkan soft skills seperti etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama dan sebagainya. Kegiatan pembelajaran di industri menjadikan mahasiswa mengenal tempat kerja dan lebih siap memasuki dunia kerja nantinya. Bagi perguruan tinggi, juga memperoleh informasi terkait permasalahan yang dihadapi di dunia industri.²⁸

Ada dua bentuk penyetaraan bobot kegiatan yaitu bentuk bebas (free form) dan bentuk terstruktur (structured form). Selain bentuk bebas dan terstruktur, ada juga bentuk gabungan (hibrida). Pertama, bentuk bebas (free form) merupakan kegiatan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah, namun dinyatakan dalam bentuk capaian kompetensi hard skills dan soft skills.²⁹ Misalnya mahasiswa magang di industri selama 6 bulan bentuk vapaian kompetensinya adalah:

a. *Hard skill*

- | | |
|---|---------|
| 1) Merumuskan permasalahan keteknikan | : 3 sks |
| 2) Menyesuaikan permasalahan teknis di lapangan | : 3 sks |
| 3) Kemampuan sintesa dalam bentuk design | : 4 sks |

b. *Soft Skill*

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1) Kemampuan berkomunikasi | : 2 sks |
| 2) Kemampuan bekerjasama | : 2 sks |
| 3) Kerja keras | : 2 sks |
| 4) Kepemimpinan | : 2 sks |
| 5) Kreativitas | : 2 sks |

Kedua, bentuk berstruktur (structured form) dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa³⁰. 20 sks dinyatakan dalam bentuk penyetaraan dengan mata kuliah dimana kompetensinya sejalan dengan kompetensi kegiatan magang. Contoh mahasiswa Teknik Kimia magang di Industri Petrokimia setara dengan belajar mata kuliah yaitu³¹:

- | | |
|--------------------------|---------|
| a. Fenomena transport | : 2 sks |
| b. Unit operasi | : 3 sks |
| c. Industri proses kimia | : 3 sks |
| d. Rekayasa reaksi kimia | : 3 sks |
| e. Kontrol proses kimia | : 3 sks |

²⁸ Puspitasari and Nugroho, "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka FISIP UPN Veteran Jawa Timur."

²⁹ Krishnapatria, "MBKM Curriculum in English Studies Program: Challenges and Opportunities."

³⁰ Autoridad Nacional del Servicio Civil, "MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM): INVENTARISASI MITRA DALAM PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Dian."

³¹ Andari et al., "Student Exchange Program of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) in Covid-19 Pandemic."

- f. Teknologi separasi : 2 sks
- g. Laporan Akhir sebagai pengganti skripsi : 4 sks

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dapat dilakukan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Tempat praktik di sekolah bisa sekolah yang berada di daerah kota dan terpencil. Tujuan asistensi mengajar adalah³²:

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berminat dalam bidang pendidikan untuk memperdalam praktek dan keilmuan menjadi guru di sekolah
- b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan perguruan tinggi.

Kegiatan ini memberi kesempatan kepada mahasiswa yang berminat menjadi peneliti. Bentuk kegiatan dapat dilakukan di lembaga riset atau pusat studi. Terlibatnya mahasiswa dalam penelitian dapat membangun cara berpikir kritis sehingga mereka dapat mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Kegiatan dapat dilakukan selama 1-2 semester³³.

Ada tiga hal yang menjadi tujuan kegiatan penelitian yaitu

- a. Mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya karena memperoleh pengalaman dalam proyek penelitian sehingga memperkuat peneliti secara topikal.
- b. Memperoleh kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung di lembaga riset atau pusat studi
- c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium sehingga adanya regenerasi peneliti. Mahasiswa didampingi selama melakukan penelitian dan melakukan riset sesuai arahan lembaga riset, membuat *logbook* dan Menyusun laporan di akhir kegiatan.

Penutup

Kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka di Indonesia mengalami siklus gelombang yang besar dengan dibuktikan banyaknya kampus yang mengikuti kebijakan kampus merdeka terdapat “lima tepat” yang perlu dipenuhi untuk keefektifan implementasi kebijakan. Pertama apakah kebijakan sendiri sudah tepat, Kedua tepat pelaksanaannya. Ketiga tepat target. Keempat Tepat lingkungan. Kelima tempat proses.

Model-model implementasi menurut Riant Nugroho pemilahan jenis teknik atau model implementasi kebijakan.

³² Rodiyah Rodiyah, “Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Era Digital Dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum Yang Berkarakter Dan Profesional,” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (2021): 425–434.

³³ Nehe, “Kampus Merdeka Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Masa Pandemi Di STKIP Setia Budhi.”

1. Dari atas ke bawah (top-bottom) ◇ partisipasi lebih berbentuk mobilisasi.
2. Dari bawah ke atas (bottom-top) ◇ kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat.
3. Implementasi yang berpola paksa (command-control) ◇ model yang mengedepankan monopoli mekanisme paksa dalam Negara, ada sanksi dan tidak ada insentif.
4. Mekanisme pasar (*economic-incentive*).

Kebijakan MBKM mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 dinyatakan dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi yang meliputi:

1. Pertukaran Pelajar
2. Magang/ praktik kerja
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4. Proyek kemanusiaan
5. Kegiatan wirausaha
6. Studi/Proyek Independen
7. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Daftar Rujukan

- Andari, Shelly, Windasari Windasari, Aditya Setiawan, and Ainur Rifqi. "Student Exchange Program of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) in Covid-19 Pandemic." *JPP (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran)* 28, no. 1 (2021): 30–37.
- Autoridad Nacional del Servicio Civil. "MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM): INVENTARISASI MITRA DALAM PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Dian." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 1 (2021): 2013–2015.
- Baharuddin, Muhammad Rusli. "Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi)." *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 4, no. 1 (2021): 195–205. <https://www.e-journal.my.id/jsqp/article/view/591>.
- Banda, Falentina Lucia, Ernesta Leha, Reyna Virginia Nona, Lely Suryani, Denny Pareira Meke, and Philipus N Supardi. "EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Persepsi Tenaga Kependidikan Tentang Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Studi Kasus Di Universitas Flores Ende" 4, no. 1 (2022): 952–962.
- Denny, Konstantinus Denny Pareira, Richardo Barry Astro, and Maimunah H Daud. "Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia." *Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 675–685.
- Fuadi, Tuti Marjan, and Dian Aswita. "Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MbkM): Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh." *Jurnal Dedikasi Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 603–614. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi>.

- Kodrat, Denny. “Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Policy.” *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4, no. 1 (2021): 9–14.
- Krishnapatria, Kriswanda. “MBKM Curriculum in English Studies Program: Challenges and Opportunities.” *ELT in Focus* 4, no. 1 (2021): 15–38.
- Make, Konstantinus Denny Preira, Richardo Barry Astro, Christina Bagenda, Sumirahayu Sulaiman, Paulinus Seda, and Ana Maria Gadi Djou. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka : Survei Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 934–943.
- Nasional, Seminar, and Fakultas Pertanian. “Sinergi DUDI Dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).” *Seminar Nasional Fakultas Pertanian Uns*, no. April (2021).
- Nehe, Berita Mambarasi. “Kampus Merdeka Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Masa Pandemi Di STKIP Setia Budhi.” *Prosiding Seminar Nasional Setiabudhi* 1, no. 1 (2021): 13–19. <https://jurnal.stkipsetiabudhi.ac.id/index.php/prosiding/article/view/18>.
- Puspitasari, Ratna, and Riant Nugroho. “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka FISIP UPN Veteran Jawa Timur.” *Jurnal Dinamika Governance* 11, no. 2 (2021): 276–292. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2539>.
- Rodiyah, Rodiyah. “Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Era Digital Dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum Yang Berkarakter Dan Profesional.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (2021): 425–434.
- Sulistiyani, Endang, Khamida, Umdatus Soleha, Rizki Amalia, Sri Hartatik, Riyan Sisiawan Putra, Rizqi Putri Budiarti, and Ary Andini. “Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Fakultas Kesehatan Dan Non Kesehatan.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 686–698.
- Susilawati, Nora. “Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme.” *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2021): 203–219.
- Tuti Marjan Fuad. “Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM: Aplikasinya Dalam Pendidikan Biologi.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 3 (2021): 2013–2015.
- Wahyudin, Yudi, Dudi Lesmana, Fia Sri Mumpuni, and Eko Rini Farastuti. “EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Evaluasi Dampak Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Bidang Studi Akuakultur” 4, no. 1 (2022): 1551–1564.

